

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDORONG KEBERHASILAN UMKM DI KABUPATEN BOGOR

Ramadhan Kamala Putra¹, Hana Indriana^{1*}

¹Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,
IPB University, Dramaga, Bogor 16680

*E-mail: hanaindriana@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sentral dalam dinamika ekonomi nasional. Namun, UMKM menghadapi masalah internal dan eksternal, termasuk ketimpangan data yang menunjukkan sedikitnya UMKM yang mengalami peningkatan usaha atau keberhasilan yaitu berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM. Peran penting UMKM dan permasalahan yang dihadapinya membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut serta mendorong pertumbuhan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara peran pemerintah daerah dengan keberhasilan UMKM di Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan peranannya dalam mendorong UMKM, UMKM di Kabupaten mengalami peningkatan dalam setiap indikator keberhasilan dan Peranan pemerintah daerah sebagai katalisator berhubungan signifikan terhadap keberhasilan UMKM.

Kata kunci: keberhasilan usaha, peran pemerintah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN ENCOURAGING THE SUCCESS OF UMKM IN BOGOR DISTRICT

ABSTRACT

UMKM have a central role in the dynamics of the national economy. UMKM face both internal and external problems, including data discrepancies that show that few UMKM have experienced business improvement or success. Business improvement or success, based on data from the Office of Cooperatives and UMKM. The important role of UMKMs and the problems they face require government intervention to overcome these obstacles and encourage the growth of UMKM. This study aims to analyse correlation between the role of local government and the success of UMKM in Bogor Regency. Bogor Regency. The results showed that the local government has fulfilled its role in encouraging UMKM, the UMKM in the Regency experienced an increase in each indicator of success and the role of local government as a catalyst. Each indicator of success and the role of local government as a catalyst is significantly related to the success of UMKM.

Keywords: *business success, role of government, UMKM*

PERNYATAAN KUNCI

- UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) berperan penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. UMKM di Kabupaten Bogor menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya keselarasan kebijakan pemerintah dan kendala pemasaran serta finansial. Pandemi Covid-19 memperburuk situasi ini, mengakibatkan penurunan penjualan dan berbagai hambatan lainnya.
- Hanya sekitar 3% UMKM dari data BPS di Kabupaten Bogor memiliki legalitas usaha lengkap, menunjukkan kesenjangan signifikan dalam pendataan dan fasilitasi oleh pemerintah daerah. Peran pemerintah sangat krusial dalam mendukung UMKM, terutama melalui penyederhanaan perizinan, akses pembiayaan, dan fasilitasi pasar. Regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 7 Tahun 2021 bertujuan menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan UMKM.
- Pemerintah daerah juga berupaya melakukan pendataan yang akurat untuk menginformasikan kebijakan yang lebih tepat dan efisien. Penelitian ini penting untuk memahami hubungan antara peran pemerintah daerah dengan keberhasilan UMKM di Kabupaten Bogor, memberikan wawasan mengenai persepsi pelaku UMKM, dan membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan relevan bagi pemberdayaan UMKM.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penting bagi pemerintah untuk mempertahankan perannya sebagai katalisator dengan memperkuat responsivitas terhadap kebutuhan pelaku UMKM serta meningkatkan koordinasi multipihak untuk mendukung UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang di pasar lokal dan nasional.

Pemerintah sebagai regulator perlu penyempurnaan definisi dan pendataan UMKM yang akurat agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kejelasan dan akurasi data serta meminimalisir kesalahan klasifikasi yang dapat mempengaruhi kebijakan dan program yang ditujukan bagi UMKM di tingkat lokal.

Pemerintah Sebagai fasilitator diharapkan dapat menumbuhkan keinginan berusaha atau memotivasi pelaku UMKM agar pelaku UMKM memiliki motivasi dalam mengembangkan usaha mereka.

PENDAHULUAN

UMKM memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia, baik secara lokal maupun nasional. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 99% bisnis di Indonesia adalah UMKM, menyumbang 61,9% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. UMKM tidak hanya motor utama ekonomi tetapi juga penyedia lapangan kerja terbesar dan aktor penting dalam pembangunan ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat (Kemenkop 2023).

Krisis ekonomi 1997-1998 menyoroiti ketahanan UMKM dalam mempertahankan ekonomi nasional. Pasca krisis, jumlah pelaku UMKM terus meningkat, menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah. UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 7 Tahun 2021 menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tingkat daerah seperti Jawa Barat, Perda No. 1 Tahun 2019 mengatur kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, dan akses pasar (Kemenkop 2023).

UMKM masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya keselarasan kebijakan, kesulitan pemasaran, kendala finansial, dan legalitas usaha. Data menunjukkan hanya sekitar 3% UMKM di Kabupaten Bogor memiliki legalitas lengkap (DiskopUKM 2022). Selama pandemi Covid-19, UMKM di Kabupaten Bogor mengalami tantangan signifikan, termasuk penurunan penjualan dan kesulitan akses permodalan (DiskopUKM 2022).

Studi kasus UMKM Rumah Nahla menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan penjualan dan pemasaran digital, mencerminkan pentingnya dukungan pemerintah dan inovasi usaha. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara peran pemerintah daerah dengan keberhasilan UMKM, serta memberikan wawasan mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap peran pemerintah sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator (Maulida *et al.* 2023).

SITUASI TERKINI

Kabupaten Bogor menunjukkan peran pemerintah yang signifikan dalam mendorong keberhasilan UMKM melalui berbagai inisiatif. Hampir 1 juta unit usaha, pemerintah daerah telah memfasilitasi dan mendata sekitar 33.000 UMKM, menyediakan fasilitas dan infrastruktur seperti pusat inkubasi bisnis dan kawasan industri kecil, serta mengadakan pameran dan bazar untuk promosi. Akses permodalan difasilitasi melalui bantuan modal usaha dan kerja sama dengan lembaga terkait. Pelatihan dan pendampingan dalam manajemen bisnis, pemasaran digital, dan keterampilan teknis rutin dilakukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Pemerintah juga responsif terhadap keluhan UMKM, membuka saluran komunikasi efektif, serta bekerja sama dengan akademisi, swasta, dan komunitas untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif. Evaluasi dan pembaruan kebijakan terus dilakukan untuk memastikan regulasi yang mendukung dan mempermudah perizinan, sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian, berisi antara lain: waktu dan tempat penelitian, kerangka logis, metode teknik pengambilan data, dan atau informasi lain yang dianggap penting. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif sebagai penjelas. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diklasifikasikan ke dalam skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan rasio (Donatus 2016).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor. Pemilihan Kabupaten Bogor sebagai lokasi penelitian yaitu dengan beberapa pertimbangan kabupaten Bogor memiliki populasi UMKM yang besar. Penggunaan data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data utama, yaitu responden dan informan. Responden merupakan sekelompok individu yang dipilih untuk memberikan informasi tentang diri mereka sendiri atau dalam konteks penelitian ini, merupakan para pelaku UMKM yang berada di binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor.

Metode pemilihan responden yang digunakan adalah metode sampling daerah atau

yang dikenal dengan istilah *cluster random sampling*. Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa teknik *cluster random sampling* digunakan ketika objek penelitian atau sumber data memiliki cakupan yang luas. Untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data, sampel diambil berdasarkan wilayah populasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Populasi pelaku UMKM ini berjumlah 423 orang yang tersebar di sepuluh kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor Barat.

Penelitian ini dibatasi pada empat kecamatan yang mewakili sepuluh kecamatan di Kabupaten Bogor (Tabel 1), yaitu wilayah dengan sebaran UMKM terbanyak dan karakteristik tertentu. Kecamatan yang menjadi sampel penelitian adalah Kecamatan Jasinga, Kecamatan Ranca Bungur, Kecamatan Pamijahan, dan Kecamatan Ciomas.

Tabel 1. Populasi UMKM yang Berhasil di Kabupaten Bogor Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Jasinga	127
2	Ranca Bungur	119
3	Ciomas	69
4	Pamijahan	57
5	Kemang	13
6	Tenjolaya	13
7	Ciseeng	12
8	Gunung Putri	7
9	Caringin	3
10	Tajur Halang	3
Total populasi		423

Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dengan metode cluster proportional random sampling, sehingga diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 44 responden (Harahap dan Silalahi 2021), di mana sampel diambil secara acak dari populasi di setiap kecamatan (Tabel 2).

Data kualitatif diperoleh dari informan dengan wawancara mendalam. Informan dapat didefinisikan sebagai pihak yang mampu mendukung kelancaran informasi yang diberikan. Data kualitatif ini digunakan untuk memperoleh data pendukung yang akan dianalisis secara deskriptif. Penetapan informan dilakukan secara *purposive* (sengaja) karena informan tersebut dinilai mempunyai kapasitas untuk memberikan

informasi terkait objek dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari kuesioner yang diproses menggunakan Microsoft Excel 2010 dan SPSS 16, disajikan dalam grafik, tabel frekuensi, dan tabulasi silang. Uji korelasi *Rank Spearman* digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara peran pemerintah daerah dan keberhasilan UMKM di Kabupaten Bogor, mengikuti kategorisasi De Vaus (2002).

Tabel 2. Sampel UMKM yang Berhasil di Kabupaten Bogor Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Jasinga	14
2	Ranca Bungur	14
3	Ciomas	8
4	Pamijahan	8
Total populasi		44

Data kualitatif diperoleh melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara mendalam, mendukung hasil analisis kuantitatif. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada 10 pelaku UMKM di Kecamatan Ciomas menggunakan koefisien korelasi *product moment Pearson*. Hasil menunjukkan beberapa pertanyaan kuesioner tidak valid, sehingga dilakukan revisi dengan bimbingan dosen. Uji reliabilitas menggunakan *Alpha Cronbach* dengan SPSS 25 menunjukkan nilai lebih besar dari 0,7 dianggap memadai. Analisis menggunakan SPSS menunjukkan 25 pertanyaan tidak memenuhi kriteria validitas.

ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/PENANGANAN

Peran pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diukur melalui tiga dimensi: fasilitator, katalisator, dan regulator. Masing-masing dimensi menggunakan dua indikator untuk mengukur peran pemerintah. Dimensi fasilitator mencakup penyediaan sarana dan prasarana serta modal usaha. Dimensi katalisator melibatkan responsivitas pemerintah terhadap keluhan masyarakat dan koordinasi dengan berbagai pihak.

Sedangkan dimensi regulator meliputi efektivitas kebijakan dan kemudahan perizinan. Adrian *et al.* 2024 menyatakan bahwa menyusun regulasi merupakan langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.

Tabel 3 menunjukkan hasil analisis distribusi frekuensi pada responden penelitian. Peran pemerintah sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator. Sebagian besar responden menilai peran pemerintah sedang sebagai fasilitator, tinggi sebagai katalisator, dan tinggi sebagai regulator. Secara keseluruhan, persepsi masyarakat terhadap peran pemerintah daerah positif, terutama sebagai katalisator dan regulator. Di Kabupaten Bogor, peran fasilitator dinilai sedang karena terdapat keterbatasan dukungan seperti pelatihan, akses modal, dan infrastruktur. Peran katalisator dan regulator dinilai tinggi karena inisiatif baru, kebijakan efektif, insentif ekonomi, penyederhanaan izin, dan pengawasan peraturan.

Tabel 3. Distribusi Derajat Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024

Peran Pemerintah Daerah	Kategori	Persen (%)
Fasilitator	Rendah	4,5
	Sedang	75
	Tinggi	20,5
Katalisator	Rendah	2,3
	Sedang	20,5
	Tinggi	77,3
Regulator	Rendah	2,3
	Sedang	18,2
	Tinggi	79,5

Derajat Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam mendorong UMKM

Pemerintah memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi UMKM. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, peran ini mencakup penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi, seperti akses jalan, pasar, pusat distribusi, dan fasilitas teknologi informasi. Sarana yang memadai memungkinkan UMKM beroperasi lebih efisien, meningkatkan produktivitas, dan memperluas jangkauan pasar. Survei menunjukkan mayoritas responden menilai ketersediaan sarana dan

prasarana dalam kategori tinggi (47,7%), sedang (34,1%), dan rendah (18,2%). Distribusi derajat peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 tersaji pada Tabel 3.

Dukungan Lapangan UMKM di Kabupaten Bogor menerima dukungan dari pemerintah daerah berupa tempat untuk bazar dan acara besar lainnya. Dukungan ini termasuk pemberian fasilitas fisik gratis atau sewa, mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung pemasaran dan promosi produk UMKM. Namun, ada keluhan tentang ketidaksesuaian bazar dengan jenis UMKM tertentu dan biaya yang tidak sebanding dengan pendapatan. Peran Pemerintah dalam Penyediaan Modal Usaha Modal usaha sangat penting bagi operasional UMKM.

Pemerintah Kabupaten Bogor mendistribusikan modal melalui berbagai program bantuan seperti Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Survei menunjukkan mayoritas UMKM memiliki ketersediaan modal yang tinggi (77,3%), sedang (20,5%), dan rendah (2,3%). Informasi tentang akses modal tersedia dari Dinas UMKM dan tertera di website resmi. Pemerintah daerah bekerja sama dengan kecamatan untuk mendata pelaku UMKM dan mendistribusikan bantuan secara merata. Pelatihan Akses Permodalan Pemerintah daerah bekerja sama dengan BUMN dan BUMD untuk menyediakan pelatihan akses permodalan, meningkatkan kapasitas UMKM dalam mengakses sumber daya keuangan. Bantuan teknis dalam bentuk uang tidak pernah diberikan langsung, tetapi melalui dinas setempat, memastikan bahwa bantuan modal tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Bogor berperan efektif sebagai katalisator dalam menangani keluhan UMKM, dengan 81,8% responden menilai responsivitas pemerintah tinggi. Dinas Koperasi dan UMKM menyediakan berbagai saluran komunikasi, termasuk pelaporan langsung, *website*, dan *WhatsApp group*. Forum UMKM di kecamatan dan desa memfasilitasi penanganan masalah, meskipun ada variasi dalam kualitas pelayanan antar wilayah akibat perbedaan sumber daya dan pengalaman aparat lokal. Koordinasi multi pihak juga dinilai tinggi oleh 75% responden. Pemerintah daerah aktif melibatkan lembaga seperti Telkom, Antam, Pegadaian, dan Pertamina melalui CSR untuk mendukung UMKM dengan modal, pelatihan, dan fasilitas bazar. Koordinasi ini mempercepat pengembangan UMKM dengan dukungan dari

berbagai instansi dan pemangku kepentingan. Tantangan dan Solusi Beberapa UMKM menghadapi tantangan dalam proses perizinan, terutama yang terkait dengan teknologi digital. Banyak pelaku UMKM dari generasi *baby boomers* kurang paham teknologi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah bekerja sama dengan kecamatan untuk membantu pengurusan perizinan, termasuk pengisian formulir *online*. Inovasi seperti SI MBA UMI dan HALO KOP-UKM Diskopukm juga diluncurkan untuk memfasilitasi manajemen data dan konsultasi, meningkatkan responsivitas pemerintah.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor menunjukkan tingkat efektivitas kebijakan yang tinggi, dengan 63,6% responden menilai kebijakan yang diterapkan efektif. Hal ini disebabkan oleh proses perumusan kebijakan yang melibatkan pemangku kepentingan melalui forum di setiap kecamatan, serta strategi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM lokal. Forum ini menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan, dengan fokus pada hambatan dan usulan dari pelaku UMKM, termasuk pelatihan dan pendampingan. Meskipun demikian, terdapat 29,5% responden yang menilai efektivitas kebijakan sedang dan 6,8% menilai rendah, menunjukkan beberapa kendala seperti perbedaan definisi UMKM dan kesulitan dalam pendataan yang dapat mempengaruhi penerapan kebijakan. Kemudahan Perizinan Tingkat kemudahan perizinan bagi UMKM di Kabupaten Bogor dinilai tinggi oleh 84,1% responden. Dinas Koperasi dan UMKM aktif menyederhanakan prosedur perizinan melalui inisiatif seperti pelatihan dan layanan berbasis forum kecamatan. Program-program ini mempermudah proses perizinan, termasuk pengisian Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui situs web OSSO.ID. Namun, 11,4% responden merasa kemudahan perizinan sedang, dan 4,5% merasa rendah, sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha. Dukungan dari pemerintah desa dan kecamatan membantu mempermudah proses, tetapi masih ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang perizinan.

Tingkat keberhasilan UMKM di Kabupaten Bogor

Penelitian ini mengevaluasi keberhasilan UMKM di Kabupaten Bogor melalui lima

indikator utama, yaitu peningkatan modal, perluasan pasar, kelengkapan legalitas, peningkatan jumlah karyawan, dan volume penjualan. Konsep keberhasilan yang digunakan merujuk pada peningkatan kinerja dan kondisi usaha yang lebih baik dari sebelumnya, seperti dijelaskan oleh Rahayu (2014) dan diukur menggunakan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor serta teori dari Suryana (2003) dan Purnamasari (2023). Distribusi tingkat keberhasilan UMKM di Kabupaten Bogor tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Tingkat Keberhasilan UMKM di Kabupaten Bogor Tahun 2024

Tingkat Keberhasilan UMKM	Jumlah	Persentase
Rendah	0	0
Sedang	10	22,7
Tinggi	34	77,3

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada UMKM yang berada dalam kategori keberhasilan rendah. Sebanyak 22,7% UMKM dikategorikan mengalami keberhasilan sedang, sedangkan 77,3% mencapai tingkat keberhasilan tinggi. Hal ini menunjukkan pencapaian signifikan dalam peningkatan kinerja dan kondisi usaha UMKM di wilayah tersebut. Modal merupakan faktor kunci dalam pengembangan usaha.

Berdasarkan data penelitian, 65,9% UMKM mengalami peningkatan modal yang tinggi, 29,5% mengalami peningkatan sedang, dan 4,5% mengalami peningkatan rendah. Peningkatan modal dipengaruhi oleh manajemen keuangan yang efektif, suntikan dari investor, dan bantuan pemerintah yang sering kali berupa pinjaman untuk pembelian bahan produksi dan alat. Perluasan pasar adalah indikator utama keberhasilan usaha. Data menunjukkan bahwa 79,5% UMKM mengalami perluasan pasar yang tinggi, 15,9% dalam kategori sedang, dan 4,5% dalam kategori rendah. Banyak UMKM di Kabupaten Bogor telah berhasil memperluas jangkauan pasar mereka, baik secara geografis maupun melalui media digital seperti *WhatsApp* dan media sosial. Ini menandakan pertumbuhan yang positif dalam kapasitas produksi dan penjualan. Kelengkapan legalitas usaha sangat penting untuk keberlangsungan UMKM. Data menunjukkan bahwa 95,5% UMKM memiliki

tingkat kelengkapan legalitas yang tinggi, sementara 4,5% memiliki kelengkapan legalitas sedang. Tingginya persentase UMKM dengan legalitas lengkap mencerminkan kesadaran tinggi akan pentingnya legalitas serta efektivitas dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM dalam memfasilitasi pemenuhan legalitas usaha. Peningkatan jumlah karyawan juga merupakan indikator keberhasilan. Sebanyak 84,1% UMKM mengalami peningkatan jumlah karyawan pada tingkat sedang, 13,6% pada tingkat rendah, dan 2,3% pada tingkat tinggi. Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak UMKM mengalami pertumbuhan jumlah karyawan, peningkatannya umumnya berada pada tingkat sedang, mencerminkan pertumbuhan yang stabil namun belum signifikan untuk mengubah klasifikasi usaha. Volume penjualan adalah indikator tambahan dari keberhasilan usaha. Data menunjukkan bahwa 54,5% UMKM mengalami peningkatan volume penjualan yang tinggi, 40,9% berada pada kategori sedang, dan 4,5% pada kategori rendah. Peningkatan volume penjualan mencerminkan keberhasilan UMKM dalam memenuhi permintaan pasar yang lebih tinggi dan memperluas kapasitas produksi. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dalam semua indikator yang diteliti. Ini menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di wilayah tersebut telah mencapai tingkat keberhasilan yang signifikan, sesuai dengan tujuan penelitian yang memfokuskan pada UMKM yang mengalami peningkatan usaha.

Hubungan peran pemerintah dengan keberhasilan UMKM

Penelitian ini menguji hubungan antara derajat peran pemerintah daerah dan tingkat keberhasilan UMKM di Kabupaten Bogor. Peran pemerintah sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator berdampak positif pada pengembangan UMKM. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 sejalan dengan Zaelani *et al.* (2022) peran pemerintah penting untuk pemberdayaan UMKM yang berkontribusi pada pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Regulasi terbaru, seperti PP No. 7 Tahun 2021 dan Perda No. 1 Tahun 2019, mendukung kemudahan pendirian usaha, perizinan, pembiayaan, dan akses pasar, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM.

Pentingnya peran pemerintah tersebut juga dikemukakan oleh Yonvitner dan Akmal (2021) pada usaha garam dengan memaparkan bahwa keberadaan UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebetulnya cukup waktu bagi pemerintah dan kementerian teknis untuk memberdayakan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Seharusnya efisiensi belanja anggaran Kementerian Kelautan Perikanan 2017 dapat dijadikan stimulus dalam percepatan implementasi UU No. 27 tahun 2016 tersebut. Waktu dua tahun jika digarap dengan serius serta visi yang tajam dalam ekonomi perikanan dan kelautan akan mempercepat pembangunan negara maritim Indonesia melalui usaha garam tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai katalisator memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat keberhasilan UMKM di Kabupaten Bogor (Tabel 5). Korelasi antara dimensi katalisator dan keberhasilan UMKM menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,387 dengan tingkat signifikansi 0,01 ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi peran pemerintah daerah sebagai katalisator, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan UMKM. Pemerintah daerah sebagai katalisator berperan dalam responsivitas terhadap keluhan dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM. Misalnya, pemerintah memberikan solusi cepat terhadap masalah permodalan dan promosi, serta menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga untuk mendukung pengembangan UMKM. Merujuk pada Solihin dan Nababan (2018), indikator kemitraan harus memperhatikan aspek pemasaran, pembinaan, permodalan, manajemen dan teknologi sebagaimana diungkapkan oleh analisis hukum melalui peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, hal ini juga senada dengan Yonvitner (2015) yang mengemukakan bahwa komitmen kebijakan pemerintah sangat penting dalam mendorong keberhasilan UMKM perikanan. Sinergi yang efektif ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM melalui peran katalisatornya.

Pemerintah daerah memiliki peran signifikan dalam mendukung keberhasilan UMKM di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data penelitian, meskipun tidak semua dimensi peran pemerintah menunjukkan hubungan signifikan.

Namun, peran fasilitator dan regulator tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurang optimalnya pelaksanaan program fasilitasi dan regulasi yang belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku UMKM. Faktor internal seperti motivasi dan inisiatif pelaku UMKM juga berperan penting dalam keberhasilan usaha. Keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh dukungan pemerintah, tetapi juga oleh kemauan dan pro-aktivitas pelaku usaha untuk memanfaatkan berbagai program dan fasilitas yang tersedia (Novitasari 2022). Pelaku UMKM yang aktif memanfaatkan program pemerintah dan pelatihan menunjukkan hasil yang lebih baik (Wastuti *et al.* 2021).

Tabel 5. Uji Korelasi *Rank Spearman* Derajat Peran Pemerintah dan Tingkat Keberhasilan UMKM di Kabupaten Bogor Tahun 2024

Peran Pemerintah Daerah	Tingkat Keberhasilan UMKM	
	Koefisien korelasi	Nilai signifikansi
Dimensi Fasilitator	0,187	0,223
Dimensi Katalisator	0,387*	0,010
Dimensi Regulator	0,068	0,277

Meskipun peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan regulator belum sepenuhnya berkontribusi secara signifikan, peran sebagai katalisator telah menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Bogor. Lebih lanjut, terkait dengan kebijakan pemerintah yang mendukung usaha lokal, merujuk pada Indriana dan Akbar (2024) diperlukan kebijakan yang sesuai tipologi kelompok yang mengakomodasi keragaman dalam implementasi praktik pertanian organik sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi lokal di bidang pertanian yang mampu mendukung penerapan pertanian organik berkelanjutan pada masyarakat lokal. Ini menandakan bahwa sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan usaha kecil dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Widiatmakaw, Munibah K, Firmansyah I. 2024. Desain Regulasi Spasial Lanskap Lahan Pertanian untuk Kemandirian Pangan Kabupaten Majalengka Hingga Tahun 2045. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan* 11(2): 113-123. <https://doi.org/10.29244/Jkebijakan.V11i2.56379>.
- De Vaus DA. 2002. *Survey in Social Research*, 5th Edition. Allen and Unwin. New South Wales.
- Diva G. 2009. *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah*. Bakrie School of Management. Jakarta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suryana. 2003. *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Salemba Empat. Jakarta.
- Donatus SK. 2016. Pendekatan kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmu Sosial: Titik Kesamaan dan Perbedaan. *Studia: Philosophica et Theologica* 16(2): 197-210. <https://doi.org/10.35312/spet.v16i2.42>.
- Harahap WS, Silalahi AD. 2021. Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics* 1(2): 199-210. <https://doi.org/10.55927/ijba.v1i2.25>.
- Iqnatia Y, Pangestuti DC. 2021. Pengaruh Literasi Keuangan, Inovasi, dan Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Apresiasi Ekonomi* 9(2): 213–228. <https://doi.org/10.31846/jae.v9i2.380>.
- Indriana H, Akbar H. 2024. Tipologi Konformitas Sosial Kelompok Petani Kecil dalam Merespon Kebijakan Pertanian Organik di Tasikmalaya Jawa Barat. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan* 11(2): 92-101. <https://doi.org/10.29244/Jkebijakan.V11i2.56645>.
- Maulida I, Mustofa A, Haryati E. 2023. The Role of Local Government in Reog Ponorogo MSME empowerment: A regulator, facilitator, and catalyst. *Journal of Community Service and Empowerment* 4(3): 568–580. <https://doi.org/10.22219/jcse.v4i3.29315>.
- Novitasari AT. 2022. Kontribusi UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi melalui Peran Pemerintah. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)* 9(2): 184–204. <http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>.
- Solihin A, Nababan BO. 2018. Analisis Kelembagaan Kemitraan Usaha Perikanan Tangkap Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya di Kabupaten Rembang. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan* 4(2): 158-173.
- Wastuti A, Sumekar W, Prasetyo AU. 2021. Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Usaha UMKM Pengolahan Pisang di Kelurahan Rowosari, Semarang. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 19(2): 195-208. <https://doi.org/10.36762/Jurnaljateng.V19i2.890>.
- Yonvitner Y. 2015. Bahan Baku: Urat Nadi Industri Pengolahan Perikanan Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan* 1(3): 187-191.
- Yonvitne R Akmal SG. 2021. Membangun Tata Kelola Garam Berdaya Saing. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan* 8(1): 53-59. <https://doi.org/10.29244/Jkebijakan.V8i1.28765>.
- Zaelani R, Sujaniqa H, Zaky M. 2022. Optimalisasi Peran Pemerintah sebagai Fasilitator, Katalisator, dan Regulator dalam Pengembangan UMKM berbasis Keuangan Syariah di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (MEA)* 6(3): 957-972. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2436>.